

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN PEDESAAN DI KABUPATEN JEMBER

Putri Widyasari 1610511012 Edhi Siswanto, S.IP, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi Ilmu Pemerintahan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, sopir angkutan pedesaan serta masyarakat. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil pembahasan dari penerapan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan terdapat beberapa kriteria yang meliputi standart dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi serta disposisi implementor. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Peningkatan Pelayanan di Kabupaten Jember dalam sasaran program angkutan pedesaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bupati Jember yaitu para pelajar dan dalam pencapaian target pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan Kabupaten Jember masih belum sesuai dengan realisasi di terminal. Para pelaksana program angkutan pedesaan diharapkan bisa lebih menjaga keindahan lingkungan dan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Angkutan Pedesaan

## ABSTRACT

*This study aims to describe the Implementation of Rural Transport Services Improvement Program in Jember Regency. In this study using a qualitative approach. Sources of data were obtained from the Transportation Sector of the Jember District Transportation Office, rural transportation drivers and the community. Data collection through interviews, observation and documentation, data analysis using Miles and Huberman models which include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the discussion of the implementation of the Rural Transport Service Improvement Program there are several criteria that include policy standards and targets, resources, relationships between organizations, characteristics of implementing agencies, social, political and economic conditions and the disposition of the implementor. From the results of the study it can be concluded that the Implementation of Service Improvement Program in Jember Regency in the target of rural transportation program is in accordance with what is desired by the Regent of Jember, namely students and in achieving the target of the implementation of the Rural Transport Services Improvement Program in Jember Regency is still not in accordance with the realization in the terminal. The implementers of the rural transportation program are expected to be able to better preserve the beauty of the environment and utilize the facilities that are available.*

**Keywords:** Implementation, Rural Transport

## I. PENDAHULUAN

Perekonomian skala nasional merupakan cara untuk membangkitkan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti dikemukakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu Pembangunan sebagai salah satu cermin Pancasila terutama dijiwai sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan waktu yang lama serta perbaikan beberapa aspek yang mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu aspek yang harus diperbaiki yaitu transportasi.

Transportasi adalah aspek yang berhubungan langsung dengan mobilitas orang maupun barang. Sulitnya mobilitas massa maupun barang dapat memperlambat proses perekonomian, seperti proses produksi, pendistribusian produk perekonomian masyarakat, lalu lintas massa dan sejenisnya. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus didukung dengan peningkatan sarana maupun prasarana transportasi yang baik. Transportasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari suatu tempat ke tempat lainnya yang disebut tempat tujuan. Karena Perjalanan mengangkut muatan dari tempat asal (origin) ke tempat tujuan (destination) disebut origin-destination travel. Suatu kondisi Barang dari tempat asal (misalnya beras dari tempat dari tempat produksi di pedesaan) dikirim ke tempat tujuan (yaitu pasar-pasar yang di perkotaan) memberikan guna (utility) yang lebih besar ke penduduk perkotaan yang membutuhkan beras untuk memenuhi konsumsi pangan sehari-hari dalam bentuk guna tempat (place utility) dengan berpindahnya tempat dari daerah produksi di

pedesaan ke pasar-pasar di perkotaan. Dalam hal ini transportasi biasanya berupa angkutan umum baik angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.

Angkutan umum sendiri merupakan Angkutan massal pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan. Sementara Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara. (Warpani, 1990).

Angkutan umum penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Pengangkutan dibedakan tiga kategori yaitu angkutan antar kota, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Angkutan antar kota dibagi dua yaitu angkutan kota antar provinsi (AKAP) adalah pelayanan jasa angkutan umum antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi, dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yaitu pelayanan jasa angkutan umum antar kota dalam satu wilayah administrasi provinsi. Angkutan umum itu sendiri terdiri atas angkutan umum perkotaan maupun angkutan umum pedesaan

Angkutan umum pedesaan adalah salah satu transportasi yang digunakan masyarakat pedesaan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berbagai daerah di pedesaan memiliki transportasi angkutan pedesaan termasuk di Kabupaten Jember. Pada umumnya Angkutan umum pedesaan di Kabupaten Jember dibagi menjadi dua yaitu angkutan pedesaan bermesin dan tidak bermesin. Angkutan pedesaan tidak bermesin merupakan angkutan pedesaan yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga

penggerakannya. Kendaraan ini tergantung pada tenaga manusia, hewan ataupun memanfaatkan keadaan alam di sekitarnya. Umumnya kendaraan tidak bermotor ini berupa becak, dokar atau cekar yang tidak bertenaga motor atau mesin. Angkutan pedesaan bermesin adalah angkutan pedesaan yang menggunakan mesin seperti angkutan pedesaan jenis colt. Pada perkembangannya, saat ini angkutan pedesaan lebih condong pada kendaraan bermesin daripada tidak bermesin.

Perkembangan Angkutan umum pedesaan di Kabupaten Jember itu sendiri dari awal tahun 2000-an hingga tahun 2009 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan bisa dikatakan mati suri. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat serta laju perekonomian yang semakin canggih. Hal itu membuat Bu Faida selaku bupati Jember ingin mengaktifkan kembali angkutan umum pedesaan agar bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat pedesaan agar memudahkan mereka untuk berpergian ke kota. Sehingga bupati Jember mengeluarkan peraturan yang menjurus pada kinerja instansi yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan mengenai angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Jember, diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Jember No.1.1 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember di lingkungan Kabupaten Jember, disebutkan bahwa uraian indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah tentang pemerataan angkutan pedesaan di Kabupaten Jember, yang tujuannya ialah untuk menghidupkan kembali angkutan pedesaan yang sempat mati suri karena armada di pedesaan yang tidak terurus, dimana pemerataan armada angkutan pedesaan dibawah naungan pihak ORGANDA dengan dinas perhubungan sebagai pihak penanggung jawabnya.

Untuk mengatasi kondisi dan mencari upaya pemecahan masalah tersebut,

perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Pada penelitian ini dilakukan peninjauan terhadap kebijakan pelayanan angkutan pedesaan yang meliputi implementasi, dampak, dan efektivitas kebijakan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Jember sebagai suatu indikator keberhasilan pencapaian dalam implementasi kebijakan dengan diberlakukannya peraturan bupati yang masih tergolong baru tersebut.

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penyelenggaraan angkutan perlu dilakukan pengawasan pelayanan angkutan pedesaan dengan melaksanakan laksanakan pengawasan dan diharapkan dapat mengetahui sejauh mana pelayanan Angkutan pedesaan selama kurun waktu setahun sejak diberlakukannya peraturan bupati tersebut serta dapat mengetahui permasalahan operasional pelaksanaan angkutan Pedesaan di lapangan sehingga dapat memperbaiki pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas angkutan Pedesaan. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi dipenuhi maka kepuasan penumpang dapat tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan kajian penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Wilayah Kabupaten Jember. Dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1.1 Tahun 2018 disebutkan bahwa uraian indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah meningkatnya aksesibilitas transportasi udara dan darat dengan sasaran kinerja adalah jumlah frekuensi penerbangan yang beroperasi dan jumlah angkutan pedesaan yang terealisasi. Salah satu manfaat IKU yang tertera dalam peraturan Bupati Jember adalah evaluasi kinerja instansi pemerintah serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Namun okus program yang diteliti adalah mengenai program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Maka dari itu, apakah indicator

kinerja tersebut sesuai pada target sasaran yang berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU) atau tidak. Selain itu, juga melihat pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember rencana-rencana apa saja yang sudah dicapai oleh Dinas Perhubungan dan apakah pada penerapan rencana strategis dan program tersebut telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jember (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember)”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, secara umum yang menjadi permasalahan adalah **“Bagaimana Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jember dengan studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember?”**

#### **Tujuan Masalah**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Jember dengan studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

## **II. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif.

Dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait Penerapan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan di Kabupaten Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi di dinas terkait yang hanya berlaku untuk program tersebut, tidak berlaku untuk program lainnya.

#### **Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dimana program tersebut sudah berjalan pada tahun 2018 di Kecamatan Balung

#### **Sumber Data**

A. Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian.

Data primer diperoleh langsung dari 3 informan yang terdiri dari:

1. Dinas Perhubungan 1 orang
2. Supir Angkutan Desa 1 orang
3. Masyarakat 1 orang

B. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan keterangan lainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

##### **1. Wawancara**

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan kepala bidang angkutan, sopir angkutan desa dan masyarakat terkait dengan program peningkatan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Jember.

##### **2. Observasi**

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap perilaku sopir angkutan desa dalam pelayanannya kepada masyarakat khususnya para pelajar dan respon Dinas terhadap program peningkatan angkutan desa dengan pemberian ijin mendirikan usaha angkutan pedesaan.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### **Metode Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan yang dipilih yaitu orang yang paling tahu tentang Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan yaitu : Ibu Dian Eka Tauristiani selaku Kepala Bidang Angkutan, Bapak Ahmad Selaku supir angkutan desa, Bapak Santoso selaku Pengawas Terminal Kecamatan Balung serta Farah selaku masyarakat.

#### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data.
3. Penyajian data, serangkaian organisasi informasi yang memungkinkan untuk operasi penelitian. Penyajian data diperoleh oleh berbagai jenis, jaringan, hubungan interaksi, atau tabel.
4. Menggambar kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti perlu memahami dan menanggapi sesuatu yang telah diselidiki langsung di lapangan

dengan mengatur pola arah dan sebab dan akibat.

#### **Keabsahan Data**

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, pertama trianggulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh penelitian.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jember.**

Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali program angkutan pedesaan, Bupati Jember mengadakan kembali program tersebut yang tertera dalam peraturan Bupati Jember Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember di Lingkungan Kabupaten Jember. Disana termuat beberapa program kerja baik program baru maupun program yang telah ada sebelumnya sebagai tindak lanjut dari program bupati periode sebelumnya. Terdapat banyak sekali program kerja yang akan dijalani oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan instansi setempat dalam hal ini adalah organisasi perangkat daerah (OPD). Kabupaten Jember sendiri memiliki 18 instansi pemerintah maupun OPD yang harus menjalankan program kerja, yang dimana merupakan tindak lanjut dari peraturan Bupati Jember Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember di Lingkungan Kabupaten Jember.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD yang sangat berpengaruh dalam menjalankan program kerja guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah Kabupaten Jember, dimana Dinas Perhubungan mempunyai kinerja utama yaitu meningkatkan konektivitas antar

wilayah dengan program kinerja yaitu peningkatan jumlah rute penerbangan di Bandara Notohadinegoro dan peningkatan pemerataan desa yang terlayani oleh angkutan umum. Angkutan pedesaan di Kabupaten Jember sendiri merupakan angkutan berupa mobil *colt* dengan kendaraan plat kuning. Hal tersebut menandakan bahwa angkutan desa tersebut mempunyai ijin trayek resmi. Adanya angkutan pedesaan di Jember itu akan sangat membantu bagi warga desa yang ingin ke kota khususnya para pelajar yang bersekolah dikota. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Dian Eka Tauristiana selaku Kepala Bidang Angkutan terkait tujuan kebijakan tentang angkutan desa, menyatakan bahwa:

“Tujuan kebijakan tentang angkutan desa ini untuk pemerataan pelayanan. Transportasi dalam hal ini merupakan urat nadi dari suatu kegiatan. Apabila transportasi tidak berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, maka semua kegiatan terkait akan terhenti. Kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan angkutan tidak hanya di desa tetapi wilayah kota juga memiliki jalur transportasi sendiri. Angkutan desa dalam hal ini sebagai sarana para penumpang untuk memudahkan perjalanan terutama para pelajar”.

Berdasarkan pembahasan di atas dalam program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan dari Dinas Perhubungan mengatakan bahwa :

#### **Standart dan sasaran kebijakan.**

Pada pelaksanaan kebijakan, standart dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga dapat direalisasi sesuai rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Standart dan sasaran kebijakan dari pelaksanaan program angkutan pedesaan yang sudah tertera secara rinci dalam Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun 2018 harus dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila standart dan sasaran kebijakan tidak

sesuai aturan yang berlaku, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Sasaran program angkutan pedesaan ini dikhususkan untuk para penumpang terutama anak sekolah. Hal tersebut sesuai dengan program Bupati Jember. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Dian Eka Tauristiani selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terkait sasaran program angkutan desa, menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan sasaran program angkutan desa di Kabupaten Jember, kami memiliki prioritas tersendiri. Pada program ini diprioritaskan khusus untuk anak-anak sekolah, karena selain memberikan kemudahan, para supir angkutan desa akan mendapat kepastian penumpang setiap harinya. Siswa difasilitasi angkutan gratis (berbayar tetapi bersubsidi) oleh pemkab Jember. Harapan kedepannya melalui program tersebut, siswa sekolah tidak terbebani sehingga tidak sampai putus sekolah. Siswa yang berjumlah kurang lebih 1000 orang, merupakan angka yang cukup untuk meningkatkan target pendapatan supir angkutan desa.”(wawancara Ibu Dian Eka Tauristiani, Selasa 31 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menganggap bahwa prioritas sasaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memberikan banyak keuntungan kepada semua pihak. Para penumpang anak sekolah mendapatkan kemudahan dalam menjalankan kegiatannya, disisi lain para supir mendapatkan penghasilan tetap setiap harinya dari hasil operasionalnya.

Banyaknya manfaat yang didapatkan dalam program ini, membuktikan bahwa peningkatan pelayanan angkutan desa yang diprioritaskan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program peningkatan pelayanan angkutan desa di Kabupaten Jember untuk saat ini sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

**Sumber Daya.** Sumberdaya pada pelaksanaan program peningkatan pelayanan angkutan pedesaan adalah tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan SLTA. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasinya di lapangan. Sumber daya manusia perlu mengetahui tugas pokok dan fungsinya masing masing sehingga dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya. Upaya meningkatkan kemampuan para pegawai, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember biasanya melakukan bimbingan teknologi (bimtek) kepada para pegawai. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Dian Eka Tauristiani selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terkait sumber daya, menyatakan bahwa:

“Semua pegawai khususnya pada bidang angkutan harus paham dengan program ini. Berkaitan dengan angkutan kota maupun desa beserta seluk beluknya, pegawai harus mengetahui dan bekerja sesuai dengan tupoksi masing masing. Kegiatan pelatihan yang diberikan harus diupgrade setiap waktu, sesuai anggaran dari Pemerintah Kabupaten Jember.”(wawancara Ibu Dian Eka Tauristiani, Selasa 31 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan secara teknis maka diadakan pelatihan atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh dinas secara upgrade. Rentang waktu pelatihan tidak secara berkala, karena anggaran yang terbatas dari Pemerintah Kabupaten Jember yang harus disesuaikan dan juga waktu penentuan para

pegawai agar tidak bentrok dengan pekerjaan yang sangat mendesak. Dinas Perhubungan selaku penganggung jawab terhadap kegiatan yang berkaitan dengan angkutan, maka Instansi ini mewadahi program angkutan pedesaan agar tetap beroperasi dengan semestinya. Pihak dinas memiliki pengaruh besar terhadap angkutan pedesaan tersebut, karena biasanya dilakukan evaluasi setiap triwulan terhadap supir beserta armadanya, untuk mengetahui perkembangan pelayanan kepada masyarakat. Angkutan pedesaan dalam hal ini sebagai penyedia layanan, pemerintah hanya memberikan ijin dan mengatur agar program tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Pengusaha angkutan umum di Jember adalah salah satu bagian yang menjadi mitra Dinas Perhubungan, untuk meningkatkan program peningkatan pelayanan angkutan.

#### **Hubungan Antar Organisasi.**

Hubungan Antar Organisasi Namun, evaluasi sudah tidak dilakukan oleh Organda karena beberapa faktor. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara oleh Aktifitas implementasi suatu program, diperlukan adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Pada implementasi program angkutan desa di Kabupaten Jember diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk keberhasilan penerapannya. Penerapan program angkutan pedesaan membutuhkan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dengan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA). Dinas Perhubungan dalam hal ini sebagai pihak yang mewadahi agar program angkutan pedesaan berjalan dengan baik, sedangkan ORGANDA sebagai pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan. Kegiatan koordinasi oleh ORGANDA beserta pihak Dishub biasa dilakukan melalui kegiatan komunikasi dan evaluasi setiap 2 bulan sekali. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Dian Eka Tauristiabi selaku Kepala Bidang Angkutan terkait kegiatan evaluasi bersama ORGANDA, menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan program angkutan pedesaan, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA). Sampai saat ini komunikasi masih berjalan, tetapi tidak terlalu intens

seperti sebelumnya. Organda bertanggung jawab atas angkutan pedesaan dan kota, serta AKDP yang berdomisili di Kabupaten Jember. Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat, di Kabupaten Jember sudah didominasi oleh angkutan online. Sedangkan angkutan online tidak dibawahi oleh Organda. Oleh karena itu, peran organda saat ini tidak seperti sebelumnya, tetapi masih tetap ada dalam event-event terkait angkutan pedesaan, kota, maupun AKDP.” (wawancara Ibu Dian Eka Tauristiani, Selasa 31 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa dalam penerapan program angkutan pedesaan, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan ORGANDA. Komunikasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan dan Organda masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi membuat angkutan pedesaan kini kurang diminati oleh para penumpang. Hal tersebut disebabkan adanya angkutan online yang hadir ditengah-tengah masyarakat, yang aman dan mudah didapatkan. Angkutan online tersebut dibawah naungan perusahaan perorangan, sehingga pihak Organda tidak dapat membawahi langsung. Oleh karena itu, peran Organda saat ini tidak seperti sebelumnya, tetapi dalam kondisi tertentu masih tetap menjalankan tugasnya. Dinas perhubungan dan organda melakukan rapat evaluasi tentang bagaimana kinerja dari program angkutan pedesaan tersebut. Pihak Dinas Perhubungan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan program tersebut.

**Karakteristik Agen Pelaksana.** Adanya keselarasan antara birokrasi, norma, dan pola hubungan tersebut, akan berdampak positif pada pelaksanaan program angkutan pedesaan yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Peraturan khusus tentang angkutan pedesaan telah mendapat persetujuan oleh pihak pemangku kebijakan seperti DPRD dan Bupati, sehingga aturan tersebut tercantu didalam Perbup Nomor 1.1 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jember. Adanya peraturan perundangan tersebut membuktikan bahwa pihak pemangku kepentingan telah mempertimbangkan penerapan program

angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berkaitan dengan target dan sasaran yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember yaitu untuk memfasilitasi siswa-siswi sekolah. Sasaran tersebut dibuat karena melihat fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Kebanyakan masyarakat telah memiliki kendaraan bermotor, namun yang lebih membutuhkan adalah para pelajar, sehingga peraturan ini lebih mengutamakan siswa-siswi sekolah. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Dian Eka Tauristiani selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, menyatakan bahwa:

“Untuk menerapkan program angkutan pedesaan diperlukan persetujuan antara dua lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah. Kedua lembaga tersebut memiliki wewenang penuh atas keputusan suatu program atau kebijakan yang akan diterapkan dalam suatu daerah. Pada program angkutan pedesaan ini, Bupati beserta DPRD telah menyepakati untuk diterapkan di Kabupaten Jember. Meskipun masyarakat sudah banyak yang memiliki kendaraan pribadi, tetapi para pelajar lebih membutuhkan. Oleh karena itu, dibuat program angkutan pedesaan ini untuk diterapkan pada masing-masing wilayah daerah Kabupaten Jember yang ditanggung jawabi oleh Dinas Perhubungan.” (wawancara Ibu Dian Eka Tauristiani, Selasa 31 Desember 2019)

Berdasarkan wawancara diatas, menunjukkan bahwa kebutuhan para pelajar merupakan pertimbangan pemerintah daerah, sehingga program angkutan pedesaan diterapkan di Kabupaten Jember. Adanya keputusan yang dibuat oleh DPRD beserta Pemerintah daerah, maka program angkutan pedesaan tercantum didalam Perbup Nomor 1.1 Tahun 2018. Peraturan Bupati tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang telah dibuat, sehingga sesuai dengan target yang ditentukan. Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas penerapan program angkutan pedesaan, dan memiliki wewenang memberi arahan serta bimbingan pada pelaksana. Kegiatan Dinas Perhubungan dalam menerapkan program angkutan pedesaan tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun



2018, agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Dian Eka Tauristiani selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terkait kesesuaian pelaksanaan program angkutan pedesaan dengan Perbup Nomor 1.1 Tahun 2018, menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan penerapan program angkutan pedesaan, pihak Dinas Perhubungan tentunya berpedoman pada Peraturan Bupati yang telah dibuat. Hal tersebut dilakukan, agar penerapan di lapangan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga target serta sasaran dapat dipenuhi sesuai harapan.” (wawancara Ibu Dian Eka Tauristiani, Selasa 31 Desember 2019)

### **Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.**

Keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari faktor pendukung, seperti sejauhmana kelompok-kelompok berkepentingan memberikan dukungan bagi penerapan program angkutan pedesaan ini. Melalui kegiatan dukungan tersebut, akan diketahui para partisipan yang menerima dan menolak diterapkannya program angkutan pedesaan. Pada proses penerapan suatu program diperlukan adanya persetujuan antara beberapa pihak, terutama pihak-pihak berkepentingan seperti para elite politik di pemerintahan. Berkaitan dengan partisipasi serta dukungan para kelompok berkepentingan dan elite politik, sejauh ini program angkutan pedesaan mendapat dukungan positif, sehingga tidak terlalu menghambat proses perkembangannya. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Dian Eka Tauristiani selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, menyatakan bahwa:

“Berkaitan dukungan yang diberikan kelompok-kelompok berkepentingan serta elite politik, cukup mendukung adanya peraturan tentang program angkutan pedesaan, mengingat target serta sasaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Dukungan yang diberikan berupa persetujuan dalam proses pembuatan peraturan program angkutan pedesaan, pemberian izin pendirian perusahaan perorangan, serta pendirian koperasi jasa angkutan dalam menunjang keberhasilan kebijakan ini. Sebagian besar pendapat

publik tentang program angkutan pedesaan baik dan menerima apabila diterapkan di Kabupaten Jember.” (wawancara Ibu Dian Eka Tauristiani Selasa, 31 Desember 2019) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa program angkutan pedesaan mendapat dukungan positif dari para elite politik dan kelompok-kelompok berkepentingan di Kabupaten Jember. Dukungan yang diberikan menunjukkan bahwa program angkutan pedesaan diterima untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Jember. Bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya berupa wacana, tetapi hal yang sangat dibutuhkan para pelaksana, seperti pemberian izin pendirian perusahaan perorangan, serta pendirian koperasi jasa angkutan.

### **Disposisi Implementor**

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu kebijakan, terutama program angkutan pedesaan. Kebijakan program angkutan pedesaan dibuat menurut persoalan dan permasalahan yang dirasakan masyarakat. salah satu perosalan yang terkait program angkutan pedesaan ialah masyarakat membutuhkan transportasi untuk pelajar ke sekolah. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. oleh karena itu, pelajar menjadi salah satu sasaran dibuatnya kebijakan program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Namun, dalam proses penerapan, respon para pelaksana kebijakan dibutuhkan untuk perkembangan program terkait. Respon para pelaksana berdasarkan kajian yang diteliti, berupa penolakan maupun penerimaan terhadap program angkutan pedesaan. Implementor atau pelaksana program angkutan pedesaan antara lain Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, supir armada, serta masyarakat. Berkaitan dengan respon yang diberikan oleh masing-masing implementor diatas, akan menunjukkan pentingnya program angkutan pedesaan dibuat. Hal tersebut disampaikan melalui wawancara oleh Ibu Dian Eka Tauristiani selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan

Kabupaten Jember terkait respon terhadap adanya program angkutan pedesaan, menyatakan bahwa:

“Program angkutan pedesaan dari dulu hingga sekarang sangatlah penting bagi masyarakat, terutama bagi para pelajar yang belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor atau yang belum mempunyai SIM. Jadi, respon kami sebagai dinas yang bertanggung jawab atas program angkutan pedesaan, sangat menerima dengan baik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut, kami juga memberi kemudahan persyaratan administratif bagi para pengusaha angkutan, yang akan mendirikan usaha angkutan tersebut.” (wawancara Ibu Dian Eka Tauristiani Selasa, 31 Desember 2019)

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas sesuai dengan data yang didapatkan, melalui teori implementasi oleh Van Metter dan Van Horn dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, telah diketahui indikator-indikator Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jember, diantaranya:

a. Standart dan Sasaran Kebijakan. Sasaran program angkutan pedesaan ini dikhususkan untuk para penumpang terutama para pelajar. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1.1 Tahun 2018. Namun, target yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember belum sesuai dengan realisasi program. Hal tersebut terbukti adanya keputusan untuk menurunkan target awal program oleh Dinas Perhubungan. Keputusan penurunan target awal program angkutan desa tersebut, membuktikan bahwa realisasi yang dilakukan kurang sesuai dengan target yang dibuat. Beberapa faktor penyebab penurunan target awal program angkutan desa antara lain seperti adanya angkutan online serta kredit kendaraan bermotor yang

mudah dilakukan, sehingga masyarakat Kabupaten Jember tidak perlu memanfaatkan angkutan desa karena memiliki kendaraan pribadi. Beberapa faktor diatas menjadi pertimbangan pihak Dinas Perhubungan untuk menurunkan target awal program angkutan desa agar target yang dibuat Sesuai dengan realisasi di lapangan.

b. Sumber Daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan program angkutan desa antara lain sumberdaya manusia seperti pegawai Dinas Perhubungan dan supir angkutan desa, beserta sumber transportasi berupa armada. Beberapa sumberdaya tersebut dibutuhkan, karena saling berhubungan satu sama lain. Sesuai hasil penelitian, terdapat beberapa armada yang masih aktif beroperasi. Namun, ada kemerosotan jumlah armada hingga 50% dari total angkutan desa yang ada. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya peminat angkutan pedesaan oleh masyarakat. Selain itu, para supir angkutan pedesaan selaku sumber daya manusia dalam program angkutan pedesaan ini, perlu mendapatkan beberapa bimbingan terkait, seperti pelayanan yang harus diberikan kepada penumpang. Namun, hingga saat ini bimbingan teknis hanya dilakukan sekali, ketika awal adanya program angkutan pedesaan. Padahal bimbingan tersebut diperlukan supir angkutan, agar dapat melayani para penumpang dengan baik.

c. Hubungan Antar Organisasi. Koordinasi antara beberapa instansi terkait program angkutan desa sangat diperlukan khususnya dalam kegiatan evaluasi dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja andes. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Organisasi terkait program angkutan pedesaan ini ialah Dinas Perhubungan dan Organda. Begitu pentingnya koordinasi yang harus dilakukan antar instansi tersebut, untuk menyukseskan program angkutan pedesaan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi tersebut, maka program angkutan pedesaan akan berjalan dengan baik sesuai

target dan sasaran yang telah dibuat. Namun, munculnya angkutan online mengakibatkan fungsi Organda berkurang, sehingga proses evaluasi terhadap supir angkutan pedesaan tidak dilakukan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan angkutan pedesaan kurang berkembang di Kabupaten Jember.

d. Karakteristik Agen Pelaksana. Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember saling berhubungan dalam upaya menyukseskan program angkutan pedesaan. Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas program angkutan pedesaan, melakukan beberapa kegiatan seperti bimbingan teknis pelaksana serta pengawasan. Namun, dalam hal ini Dinas Perhubungan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam melakukan pendistribusian anggaran berupa pemutihan retribusi kepada para pelaksana seperti supir armada. Oleh karena itu, hubungan antara Dinas Perhubungan dengan Pemerintah Daerah berpengaruh bagi perkembangan program angkutan pedesaan yang sedang diterapkan di Kabupaten Jember.

e. Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi. Berkaitan dengan kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi mencakup segala dukungan dari berbagai pihak seperti kelompok-kelompok berkepentingan. Dukungan yang diberikan bukan hanya berupa wacana, tetapi hal yang sangat dibutuhkan para pelaksana, seperti pemberian izin pendirian perusahaan perorangan, serta pendirian koperasi jasa angkutan. Hal tersebut merupakan upaya dari pihak-pihak berkepentingan dan elite politik dalam membantu menyukseskan implementasi program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Selain itu, dukungan sosial dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menerapkan program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa program angkutan pedesaan mendapat dukungan sosial masyarakat untuk tetap menerapkan kebijakan ini dengan lebih baik. Kondisi ekonomi para supir angkutan pedesaan perlu diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan bukti keluhan para supir angkutan terhadap Dinas dan Pemerintah

Daerah yang berjanji akan memberikan suatu bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp600.000.- kepada masing-masing supir. Bantuan tersebut sangat dinantikan, namun tidak kunjung diberikan hingga saat ini. Kondisi ekonomi supir angkutan seperti ini cukup memprihatinkan, sehingga perlu diperhatikan terutama oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, agar program yang telah dibuat dapat diterapkan dengan baik.

f. Disposisi Implementor. Dinas Perhubungan sebagai implementor memberi respon baik atas dilaksanakannya program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Hal tersebut menimbang beberapa kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, terutama para pelajar dalam melakukan aktifitas ke sekolah. Selain itu, Para supir armada memberi respon baik terhadap program tersebut, karena memiliki manfaat dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, disamping itu terdapat supir yang berpendapat bahwa pihak Dinas Perhubungan selaku pelaksana kebijakan sekaligus fasilitator kurang responsif terhadap kebutuhan yang perlukan supir-supir armada. Pemahaman para supir angkutan terhadap program angkutan pedesaan ini, bahwa dalam melaksanakannya akan diberi fasilitas oleh Dinas Perhubungan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah. Namun, hingga saat ini fasilitas tersebut belum supir angkutan dapatkan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah maupun Dinas Perhubungan perlu memerhatikan respon supir armada terkait keluhan terhadap sikap yang diberikan kepada supir-supir angkutan pedesaan.

Saran

Kebijakan Pemerintah tentang Angkutan Pedesaan merupakan program yang diselenggarakan oleh Bupati Jember, tercantum dalam Perbup Nomor 1.1 Tahun 2018. Peraturan tersebut merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk menjadikan masyarakat lebih baik, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut berlangsung sejak tahun 2018 hingga sekarang. Terdapat beberapa keluhan dan permasalahan yang timbul dengan adanya

penerapan program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember. Saran saya terkait Implementasi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Jember, antara lain:

1. Saran akademis

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pedesaan dibutuhkan dalam bidang keilmuan, agar dapat dijadikan rujukan atau referensi akademis. Kebutuhan terhadap peningkatan pelayanan angkutan pedesaan, diharapkan bisa memunculkan konsentrasi khusus tentang ilmu terkait pada setiap perguruan tinggi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan implementasi peningkatan pelayanan khususnya program angkutan pedesaan bisa terus dikaji dan dikembangkan secara ilmiah.

2. Saran praktis

Dikhususkan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan agar lebih memperhatikan keluhan-keluhan para supir angkutan pedesaan, serta kondisi pada tiap-tiap terminal. Para pelaksana program angkutan pedesaan diharapkan bisa lebih menjaga keindahan lingkungan dan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia. Peneliti menyarankan bahwa ketika melakukan proses evaluasi oleh Dinas Perhubungan, diharapkan segera memberi solusi atas permasalahan yang muncul, sehingga program angkutan pedesaan di Kabupaten Jember dapat berkembang. Hal tersebut merupakan bentuk permintaan dari supir angkutan pedesaan Kabupaten Jember kepada Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA. 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi. Cetakan VII. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
Meter, Donald S. Van & Horn, Carl E. Van (1975), "The Implementation Process: A Conceptual Frame-work" di dalam Administration and Society, Vol.6, No.4.  
Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik. Cetakan II. Yogyakarta : Gava Media.  
Ahmad Ashfiak (Juli 2018) Merosotnya Transportasi Angkutan Umum Pedesaan

Kabupaten Lamongan Pada Tahun 1994-2017, e-Jurnal Pendidikan Sejarah , Volume 6 Nomor 2

Andi Iswarah AS, Adam Idris, dan Nur Hasanah (2018); Implementasi Kebijakan Transportasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kota Samarinda (Studi Kasus Pada Angkutan Kota Di Kota Samarinda), eJournal Ilmu Pemerintahan

Dinar Rizki Oktavianti, Dra. Dyah Lituhayu, M.Si (2016); Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri), eJournal Administrasi Publik

Dewa Ayu Dwi Wira Utami, Ketut Winaja, Putu Eka Purnamaningsih, Implementasi Program Angkutan Siswa Trans Serasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Angkutan Siswa Gratis di Kabupaten Tabanan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana  
Siswanto A Victorianus. 2012. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Peraturan Bupati Jember No 1.1 Tahun 2018

Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Tarif Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Ojek Pangkalan untuk Pelaksanaan Program Penyediaan Angkutan Kota, Angkutan Desa dan Ojek Pangkalan Bagi Sasaran Kelompok Pelajar Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2019